

## ***Stakeholder Response, Sustainability Transition, And Sustainable Tourism Development In Sikka Regency***

### **Respon Stakeholder, Transisi Keberlanjutan Dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Sikka**

**Aloysius Paskalis Langga BT<sup>1</sup>, Aisyah Astinadia Siregar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Cristo Re, Maumere, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Putra Bangsa, Kebumen, Indonesia

Email: [algonzagabt@gmail.com](mailto:algonzagabt@gmail.com)<sup>1</sup>, [aisyah\\_siregar@feb.universitaspuputrabangsa.ac.id](mailto:aisyah_siregar@feb.universitaspuputrabangsa.ac.id)<sup>2</sup>

#### **Abstract**

*This transdisciplinary era demands a strategic approach to encourage tourism development that is environmentally friendly and pro-grassroots. Sustainability transition is a crucial issue in regional tourism development to achieve sustainable development goals. This research aims to analyse the existence of stakeholders in the sustainability transition, stakeholder perceptions in the transition and formulate a stakeholder collaboration model in the implementation of the transition. The research paradigm used is qualitative with a critical discourse analysis approach. Researchers collected data through policy documents, reports, media articles, and tourism promotion materials. Researchers conducted in-depth interviews with local governments, tourism industry players, local communities, and NGOs. The findings of this study are that the discourse of sustainable tourism transition has been initiated by the local government through a review of the regional tourism development master plan. Stakeholders' perceptions are positive but many improvements are needed in rural destinations that have not received serious attention. Thus, this research formulates a model of stakeholder collaboration in the transition as a conceptual framework in the realization of the discourse.*

**Keywords:** *Stakeholder response, sustainability transition, sustainable tourism development, regional tourism*

#### **Abstrak**

Era transdisipliner ini menuntut pendekatan strategis untuk mendorong pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan pro pada masyarakat akar rumput. Transisi keberlanjutan menjadi satu isu krusial dalam pembangunan pariwisata regional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan pemangku kepentingan dalam transisi keberlanjutan, persepsi pemangku kepentingan dalam transisi tersebut dan merumuskan model kolaborasi pemangku kepentingan dalam implementasi transisi tersebut. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *critical discourse analysis*. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen kebijakan, laporan, artikel media, dan materi promosi pariwisata. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemerintah lokal, pelaku industri pariwisata, komunitas lokal, dan LSM. Temuan penelitian ini adalah adanya wacana transisi pariwisata berkelanjutan telah di inisiasikan oleh pemerintah daerah melalui review rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Persepsi pemangku kepentingan memang positif akan tetapi diperlukan banyak perbaikan di destinasi pedesaan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan model kolaborasi pemangku kepentingan dalam transisi tersebut sebagai kerangka konseptual dalam realisasi wacana tersebut.

**Kata Kunci:** Respon stakeholders, transisi keberlanjutan, pembangunan pariwisata berkelanjutan, pariwisata regional

## PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak lepas dari pusaran krisis global. Di antara krisis tersebut, ancaman yang paling nyata adalah perubahan iklim dan kerusakan ekologis yang akan menghasilkan efek jangka panjang yang tidak dapat diperbaiki. Pariwisata mulai memberikan lebih banyak perhatian pada keberlanjutan (UNWTO, 2019; Sawu dkk, 2024) dan perubahan iklim (Scott dan Gossling, 2018; Sawu dkk, 2024) dalam tujuan kebijakannya. Arah pengembangan pariwisata perlu dipikirkan ulang, didefinisikan kembali dan juga diorientasikan ulang. Paradigma ini perlu diterapkan di berbagai destinasi sebagai sikap terhadap krisis global dan juga upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pariwisata hendaknya menjadi katalisator keseimbangan pembangunan, bahkan restorasi pariwisata itu sendiri.

Sawu dkk (2024) mendalilkan bahwa paradigma pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan dan dianggap tidak cukup sehingga diperlukan regenerative untuk merubah destinasi pariwisata. Percepatan perubahan iklim (IPCC, 2018; Sawu, 2024) membuat destinasi wisata semakin sulit mengabaikan dampaknya dan merespons secara pasif, meskipun pariwisata memiliki potensi kapasitas adaptasi yang tinggi (Scott dan Becken, 2010; Sawu, 2024). Literatur menyoroti kerentanan di banyak destinasi (Scott dkk., 2019; Sawu, 2024) dan perlunya perencanaan adaptasi antisipatif (Becken, 2017; Sawu, 2024). Maka dari itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan yang terkait untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Kebijakan pembangunan pariwisata menjadi pondasi penting dalam instrument pengembangan pariwisata kedepan. Perumusannya bertujuan

untuk mengembangkan potensi daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakannya terdiri dari destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Adaptasi terhadap perubahan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan pariwisata. Perhatian terhadap keruangan pariwisata, tren produk dan minat wisatawan serta mobilitas wisatawan diperlukan untuk menjaga resiliensi ekonomi pariwisata daerah. Sawu (2024) tren praktik pariwisata regeneratif yang sedang berlangsung di destinasi ini. Namun, praktik pariwisata regeneratif ini belum dikembangkan dengan baik. Dasar masalahnya adalah masih minim sumber daya manusia pariwisata dan juga rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal.

Pembangunan pariwisata hendaknya memegang prinsip inklusivitas sosial, inklusivitas ekologis dan inklusivitas rasional. Hassan dan Burns (2014) menyatakan bahwa proses perumusan kebijakan memerlukan pengetahuan ahli mengenai faktor-faktor yang berubah secara global dan tingkat ketersediaan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat. Isu-isu teoritis dan tematik hendaknya tercermin dalam rencana kebijakan pariwisata yang efektif. Sawu (2024) menyebutkan bahwa praktik pengembangan pariwisata regeneratif di Kabupaten Sikka sampai saat ini belum terintegrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan belum dihasilkan rencana induk terpadu pariwisata sebagai turunan dari rencana induk pariwisata daerah yang ada.

Berdasarkan rekaman sosial, kesiapan destinasi dalam transisi pada tataran produk pariwisata masih sangat minim di tengah sumber daya pariwisata yang massif. Pengembangan produk pariwisata saat ini hanya berlangsung di beberapa desa wisata. Diantaranya

adalah Desa Wisata Koja Doi, Desa Wisata Egon Buluk, Desa Wisata Uma Uta dan Desa Wisata Kolisia. Walaupun demikian, dominan atraksi wisata yang ditawarkan adalah atraksi keruangan bukan atraksi aktivitas. Terlepas dari itu, komponen produk yang lainnya juga masih minim dalam pengembangannya. Faktor pemicunya adalah kebijakan dan program kerja pengembangan destinasi pariwisata yang belum tepat sasaran dan juga mobilitas kunjungan wisatawan ke daerah masih minim. Hal tersebut berpengaruh besar dalam perkembangan destinasi pariwisata dan memerlukan respon *stakeholders* guna mengatasi permasalahan tersebut. Partisipasi *stakeholders* menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan tersebut dan juga mendorong transisi keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas *stakeholders*, berfokus pada keuntungan jangka pendek, regulasi dan pengawasan yang lemah serta minim advokasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh besar dalam perkembangan destinasi pariwisata, khususnya dalam transisi keberlanjutan itu sendiri. Permasalahan sosial pariwisata ini hendaknya direduksi dengan melakukan pendekatan strategis dengan tujuan untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata dan transisi keberlanjutan itu sendiri. Pariwisata hendaknya menjadi katalisator dalam mencapai tujuan tersebut sekaligus pencapaian SDGS. Relevansi antara pengelolaan pariwisata dan praktik tata kelola tempat yang efektif menjadi semakin penting untuk mencapai peran sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik (Mata, 2019). Multiplisitas aktor dalam jaringan destinasi interdisipliner secara bersamaan mengharuskan pemangku

kepentingan memiliki kemampuan fleksibel dan adaptif untuk mendorong tata kelola kolektif untuk menghasilkan keputusan yang inklusif dan bagaimana mengimplementasikannya (Koens dkk, 2018).

Penelitian ini berfokus pada analisis pemetaan *stakeholders*, persepsi *stakeholders* dan model kolaborasi pemangku kepentingan dalam transisi keberlanjutan. Pariwisata melibatkan banyak sektor dan memberikan dampak terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk wisatawan, komunitas destinasi, operator bisnis, pemerintah pada berbagai skala, lembaga publik, organisasi non-pemerintah, dan sebagainya (Su dan Wall, 2011). Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ada peningkatan konsensus akademis mengenai perlunya transisi berkelanjutan dalam sistem pariwisata akan tetapi pendekatan dan instrument dalam transisi tersebut belum jelas (Tops dan Lamers, 2024). Transisi didefinisikan sebagai proses jangka panjang di mana ada perubahan secara mendasar oleh masyarakat (Rotmans et al., 2001) dan mengacu pada perubahan keseimbangan dinamis suatu sistem dari satu keadaan keseimbangan terhadap keadaan lainnya dan juga merujuk pada perubahan rezim (Smith dkk., 2005).

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan *critical discourse analysis*. Analisis wacana kritis adalah gerakan penelitian interdisipliner untuk mengkaji dimensi semiotik kekuasaan, ketidakadilan, penyalagunaan dan perubahan politik-ekonomi atau budaya dalam masyarakat (Fairclough et al., 2011). Wodak dan Meyer (2009) mendefinisikan analisis wacana kritis sebagai tujuan untuk menyelidiki kesenjangan sosial secara kritis sebagaimana diungkapkan, dibentuk,

dilegitimasi, dan sebagainya, melalui penggunaan bahasa.

Data dikumpulkan melalui dokumen kebijakan, laporan, artikel media, dan materi promosi pariwisata. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemerintah lokal, pelaku industri pariwisata, komunitas lokal, dan LSM. Tema utama dalam kajian ini adalah keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi dalam pengembangan produk pariwisata. Peneliti melakukan kontekstualisasi wacana lokal dengan kebijakan nasional tentang transisi pariwisata berkelanjutan dan identifikasi peran para *stakeholders* yang digambarkan dalam wacana publik. Pendekatan ini membantu mengungkapkan dinamika kekuasaan dan praktik keberlanjutan pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Keberadaan *Stakeholders* Dalam Transisi Keberlanjutan Dan Pembangunan Pariwisata

Pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kebijakan dan arah pengembangan produk pariwisata berkelanjutan. Sinergitas diantaranya sangat penting untuk mendukung pengembangan pariwisata sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Pemangku kepentingan hendaknya memegang sikap positif karena perilakunya sangat menentukan arah pengembangan dari pariwisata itu sendiri. Sikap pemangku kepentingan dapat dilihat melalui tiga hal yakni perspektif pemangku kepentingan, relasi pemangku kepentingan dan partisipasi pemangku kepentingan. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk mendorong transisi pengembangan pariwisata daerah menuju keberlanjutan itu sendiri. Dengan demikian, tujuan untuk

mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.

Wacana kebijakan pengembangan telah didorong oleh pemerintah untuk memajukan pembangunan pariwisata. Klaim pemerintah bahwa telah terjadi banyak perubahan mendasar dalam sektor pariwisata. Klaim tersebut merujuk pada perubahan internal dan eksternal selama 10 tahun terakhir. Pada konteks eksternal, dikatakan bahwa keberadaan destinasi super prioritas Labuan Bajo merubah rute perjalanan. Sedangkan, konteks eksternal menunjukkan bahwa adanya pemekaran wilayah desa/kelurahan dan tumbuhnya daya tarik wisata baru turut mempengaruhi pembangunan kepariwisataan. Selain itu, dengan terbitnya Permen Pariwisata No.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Ripparprov/Ripparkab/kota dan regulasi perencanaan terbaru RPJMD dan RTRW mengharuskan Kabupaten Sikka melihat kembali Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sehingga dokumen substansi Ripparda harus menyesuaikan dengan ketiga regulasi.

*“Saat ini, pola perjalanan tersebut berubah menjadi Bali-Labuan Bajo-Sikka. Reviu ini juga dilakukan untuk mendorong sinergi antar sektor dan OPD, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal”. Ujar Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, S.T., M. Eng mewakili Pj Bupati Sikka pada Seminar Pendahuluan Review Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Sikka, Rabu (30/4/2024). (Sumber: Puspar UGM, 2024).*

Wacana pendekatan keilmuan dalam transisi pengembangan pariwisata daerah telah didorong oleh

para akademisi. Destinasi pariwisata Kabupaten Sikka dilihat memiliki peran vital dan lokasi yang sangat strategis sehingga memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi dan budaya masyarakat melalui sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan memiliki beragam potensi unggulan yang dapat dikembangkan lebih optimal sehingga dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 08, SDGs 13 dan SDGs 17 dengan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata. Pendekatan partisipatif hendaknya digagas dalam perencanaan pembangunan pariwisata sehingga masyarakat dapat menjadi subjek dan objek sehingga merasakan manfaatnya secara langsung.

*“Oleh karena itu, dalam seminar ini juga digagas untuk dibentuknya forum komunikasi pariwisata yang terdiri atas enam unsur di atas sebagai upaya mengoptimalkan pembangunan pariwisata Kabupaten Sikka serta memperkuat sinergi dan komitmen di antara para pemangku kepentingan pariwisata di atas”. (Sumber: Mohamad Yusuf selaku Tim Ahli Puspar UGM, 2024).*

Secara empiris, dominasi pengembangan pariwisata ini kurang berpihak pada masyarakat lokal karena minim tumbuhnya daya tarik wisata yang baru. Daya tarik wisata yang berada dalam tahap rintisan dan berkembang. Daya tarik rintisan terdiri dari Desa Wisata Egon, Desa Wisata Nenbura dan Desa Wisata Kolisia. Sedangkan, daya tarik berkembang terdiri dari Desa Wisata Koja Doi dan Desa Wisata Uma Uta. Kunjungan wisatawan masih minim sehingga pertumbuhan wirausaha lokal

juga masih rendah. Partisipasi masyarakat secara sosio ekonomi juga masih sangat rendah. Faktor pemicunya adalah respon pemasaran dari daya tarik wisata yang merupakan rintisan dan berkembang belum mampu mengjangkau pasar pariwisata secara luas. Terlepas dari itu, strategi pemasaran pariwisata daerah juga masih belum menarik banyak minat wisatawan sehingga berpengaruh juga terhadap mobilitas wisatawan ke kawasan regional.

*“Masyarakat disini cukup antusias dalam pengembangan pariwisata. Namun, masih ada banyak hambatan seperti SDM dan modal usaha. Selain itu, kunjungan wisata juga masih rendah. Kami belum terlalu paham dalam memasarkan produk disini”. (Sumber: Pelaku Usaha Lokal, 2024).*

Fakta sosial menunjukan bahwa pertumbuhan daya tarik wisata baru masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan advokasi pengembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal masih rendah. Mayoritas masyarakat lokal di daerah dengan potensi wisata yang bagus belum menyadari manfaat dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Program kerja pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka) belum tepat sasaran bagi masyarakat lokal. Secara riil, terdapat banyak pembangunan fasilitas pariwisata yang mubasir karena tanpa perencanaan yang matang dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam pengembangan tersebut. Dorongan terhadap daya tarik wisata baru belum terlihat signifikan dalam implementasinya. Sejauh ini, dorongan terhadap daya tarik wisata baru digerakan oleh lembaga swadaya masyarakat (Asidewi Kabupaten Sikka). Adapun daya tarik yang dikembangkan yakni Desa Wisata Nenbura dan juga

Desa Pangabatang yang sedang berproses untuk menjadi desa wisata.

*“Kita mendorong beberapa daerah untuk jadi desa wisata. Kita libatkan secara penuh masyarakat lokal. Saat ini, ada satu daerah yang sudah berhasil kita kembangkan jadi desa wisata yaitu Nenbura. Sedangkan, Pangabatang sedang berproses untuk jadi desa wisata”. Sumber: (Ketua Asidewi Kabupaten Sikka, 2024).*

#### **b. Persepsi Stakeholders Dalam Transisi Keberlanjutan Dan Pembangunan Pariwisata**

Transisi keberlanjutan dalam pariwisata ditandai dengan pertumbuhan wirausaha lokal yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Wirausaha lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi sosio ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wirausaha pariwisata dengan mengangkat potensi lokal diharapkan memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat lokal. Proses untuk mengembangkan wirausaha memerlukan motivasi yang kuat dari masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui inovasi produk wisata lokal. Potret peluang juga sangat menentukan di daerah yang prospektif ketika kebijakan pemerintah mendukung pengembangan pariwisata untuk menciptakan ekonomi baru di daerah tersebut. Selain itu, kemampuan masyarakat lokal untuk menyajikan produk pariwisata dengan mengedepankan inisiasi konservasi menjadi elemen fundamental dalam menyosong transisi pembangunan pariwisata tersebut.

Pertumbuhan wirausaha dapat ditelusuri melalui desa wisata sebagai transisi pengembangan pariwisata

berkelanjutan. Kondisi wirausaha tersebut dikembangkan oleh masyarakat lokal berbasis pada motivasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi ditengah kebijakan pariwisata daerah dengan menyajikan potensi lokal. Pengembangan wirausaha pariwisata dilakukan baik secara individu dan juga secara komunitas. Adapun pengembangan wirausaha pariwisata secara individu dikelola oleh pemilik sendiri dan juga terdapat beberapa yang mempekerjakan masyarakat lokal. Sedangkan, wirausaha yang dikembangkan secara komunitas menerapkan sistem bagi hasil. Secara riil, pengembangan wirausaha dapat dilihat melalui daya tarik wisata, jasa makanan dan minuman, homestay, café dan paket wisata. Namun, wirausaha pariwisata tersebut masih sangat minim karena pengaruh internal dan pengaruh eksternal.

*“Kami mengembangkan beberapa usaha kecil untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Ada yang secara individu dan secara berkelompok. Kami juga perlu peningkatan karena saat ini masih apa adanya saja. Kami punya banyak kendala dalam pengembangan ini: (Sumber: Pelaku Usaha Lokal, 2024).*

Pertumbuhan wirausaha pariwisata yang masih minim dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal. Diantaranya adalah sumber daya manusia, modal ekonomi dan kemitraan. Dalam sektor pariwisata, adaptasi terhadap situasi dan kondisi dalam melayani wisatawan berbeda dengan usaha lain pada umumnya. Pengembangan sumber daya manusia perlu disesuaikan dengan sub sektor usaha pariwisata terkait. Perihal modal, masyarakat lokal masih memiliki modal yang minim sehingga perlu didorong oleh pemerintah dalam mengakses modal tersebut. Selain itu,

kemitraan dengan pihak industri pariwisata luar masih sangat minim. Sinergi dengan pihak luar ini perlu dibangun, khususnya respon pemasaran dalam pengembangan produk lokal. Dalam rangka mengatasi itu, masyarakat lokal perlu diberikan varian pemberdayaan sehingga kondisinya yang dari *powerless* bertransformasi menjadi *powerfull*.

*“Masyarakat perlu mendapatkan pelatihan di berbagai varian sub sektor pariwisata. Adaptasi terhadap iklim pariwisata ini memerlukan waktu dan SDM yang bagus untuk melayani wisatawan. Akses terhadap modal juga perlu didukung oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat lokal. Selain itu, sinergitas stakeholders perlu dibangun karena memerlukan kolaborasi dalam pembangunannya”. (Sumber: Akademisi, 2024).*

Implikasi ekonomi yang dihasilkan selama ini bagi masyarakat lokal masih minim dan bersifat fluktuatif. Hal ini berkaitan erat dengan faktor eksternal yakni arus pergerakan wisatawan ke daerah. Minimalitas wisatawan yang berkunjung sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan wirausaha lokal. Kebijakan umum dan pemasaran menjadi isu krusial bagi pariwisata daerah. Pengembangan destinasi baru tanpa perencanaan menyebabkan pengembangannya sering mengalami stagnansi. Perubahan rute transportasi menjadi penyebab utama kunjungan wisatawan ke destinasi pedesaan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya perubahan rute sebelumnya juga sering terjadi kunjungan wisatawan yang minim dan fluktuatif. Strategi komponen pemasaran belum terpetakan dengan baik dan belum mampu mengakses pangsa pasar pariwisata secara luas. Dengan demikian, menghambat pertumbuhan destinasi

baru, khususnya pengembangan usaha pariwisata pedesaan.

*“Masalah di destinasi pariwisata pedesaan ini adalah akses terhadap pasar. Secara riil, belum banyak wisatawan yang mengenal destinasi baru tersebut. Selain itu, perubahan kebijakan juga turut berpengaruh terhadap pergerakan wisatawan ke kawasan regional”. (Sumber: Asidewi Kabupaten Sikka, 2024)”.*

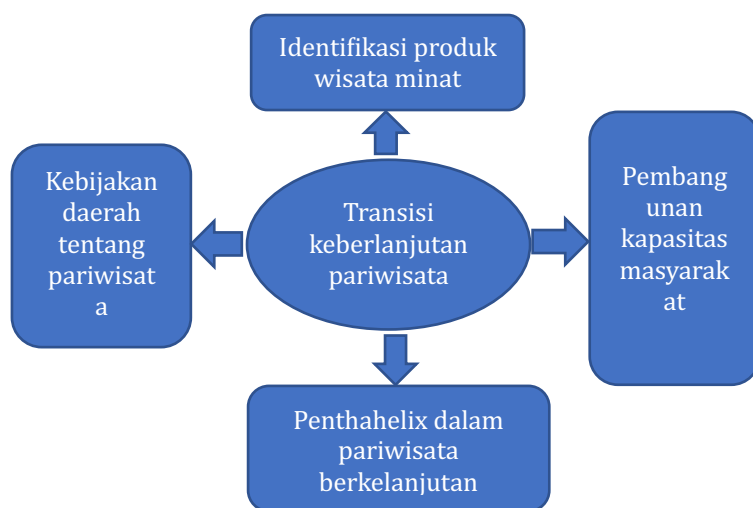
### c. **Kolaborasi Stakeholders Dalam Transisi Keberlanjutan Dan Pembangunan Pariwisata**

Pengembangan kolaboratif merupakan aspek vital sebagai mekanisme pengorganisasian pemangku kepentingan dalam transisi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan kolaboratif mampu membantu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola, memberikan kepuasan wisatawan, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan pariwisata yang berkualitas. Produk pariwisata pedesaan sangat beragam dalam pengembangannya dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam pengembangan destinasi pedesaan. Transisi pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan pendekatan kolaboratif untuk memajukan produk yang dimiliki di daerahnya. Pariwisata berkelanjutan dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan dan konservasi, akan tetapi dilakukan oleh beragam pemangku kepentingan, yang mewakili tujuan pemangku kepentingan yang luas.

Pemangku kepentingan langsung adalah anggota masyarakat dengan beragam pendapat, kepentingan, dan aspirasi. Dampak dari aktor-aktor sosial yang berbeda yang mewakili komunitas yang lebih luas mempunyai kepentingan



yang berbeda-beda. Penting untuk dicatat peran kekuasaan dalam upaya kolaborasi. Peneliti berpendapat bahwa pengembangan kolaboratif dapat mengurangi keterbatasan yang dihadapi masyarakat lokal. Keterbatasan tersebut antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia pariwisata, terbatasnya modal sosial, dan kurangnya sumber daya keuangan untuk mengembangkan sarana dan prasarana. Hal ini memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pembangunan.



Transisi keberlanjutan memerlukan sinkronisasi terhadap keempat pilar tersebut dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Upaya untuk merealisasikan itu hendaknya ada kesamaan visi oleh para pemangku kepentingan. Kapasitas masyarakat lokal perlu dibangun oleh pemangku kepentingan eksternal untuk meningkatkan partisipasi dalam konteks sosial ekonomi. Masyarakat lokal harus menjadi subjek dan objek dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan kedepannya. Kebijakan pariwisata daerah hendaknya memberikan ruang yang besar bagi masyarakat lokal di pedesaan. Dengan demikian, produk wisata minat khusus pedesaan dapat

berkembang dan menarik minat kunjungan wisatawan yang signifikan.

## KESIMPULAN

Wacana transisi pariwisata berkelanjutan telah diinisiasikan oleh pemerintah daerah melalui reviu rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Hal ini terjadi tidak hanya sekedar imperatif regulasi tetapi juga perkembangan wilayah regional dan juga munculnya daya tarik wisata yang baru. Pariwisata regional dilihat memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi baru melalui sektor pariwisata. Keberadaanya sangat strategis sehingga perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi wisata yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan memiliki respon yang positif akan tetapi memerlukan banyak perbaikan. Transisi kearah pedesaan menjadi kunci dalam memajukan pariwisata regional.

Pada saat ini, telah ada beberapa desa wisata yang merupakan rintisan dan juga berkembang. Namun, pertumbuhan wirausaha pariwisata masih sangat minim. Faktor pemicunya adalah sumber daya manusia pariwisata, akses modal dan juga kemitraan dengan pemangku kepentingan eksternal. Gejala sosial tersebut menyebabkan minim partisipasi sosio ekonomi masyarakat lokal dan berpengaruh terhadap upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam upaya transisi pariwisata berkelanjutan tersebut. Pemangku kepentingan perlu berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pariwisata di pedesaan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Becken, S., (2017). Evidence of a low-carbon tourism paradigm?. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(6), 832–850. doi: 10.1080/09669582.2016.1251446
- Theory to Sustainable Tourism Development', *Tourism Review* 62(2): 6–13
- Fairclough, N., Wodak, R., and Mulderrig, J. (2011). Critical discourse analysis. In T. van Dijk (Ed.), *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction* (2nd ed.). London: Sage. pp. 357–378
- Hassan, A., & Burns, P. (2014). Tourism policies of Bangladesh—A contextual analysis. *Tourism Planning & Development*, 11(4), 463–466
- IPCC. (2018). Global Warming of 1.5 C. Summary for policymakers. Retrieved November 14, 2018, from [http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15\\_spm\\_final.pdf](http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf)
- Koens, K., Postma, A., & Papp, B. (2018). Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. *Sustainability*, 10(12), 4384. doi:10.3390/su10124384
- Mata, J. (2019). Intelligence and innovation for city tourism sustainability. In E. F. Sola & C. Cooper (Eds.), *The future of tourism* (pp. 2123–2232). Cambridge: Springer
- Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. (2001). More evolution than revolution: Transition management in public policy. *Foresight*, 3(1), 15–31. <https://doi.org/10.1108/14636680110803003>
- Sawu, M. R. (2024). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Regeneratif di Desa Wisata Koja Doi, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Thesis. Udayana University: Bali-Indonesia
- Scott, D., dan Becken, S., (2010). Adapting to climate change and climate policy: Progress, problems and potentials. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(3), 283–295. doi:10.1080/09669581003668540
- Scott, D., Gossling, S. (2018). Tourism and climate change mitigation. Embracing the Paris Agreement: Pathways to decarbonisation. European Travel Commission. Retrieved from January 14, 2019. [https://etc-corporate.org/uploads/2019/03/ETC-Climate-Change-Report\\_FINAL.pdf](https://etc-corporate.org/uploads/2019/03/ETC-Climate-Change-Report_FINAL.pdf)
- Scott, D., Hall, C. M., dan Gossling, S., (2019). A Global Climate Change Vulnerability Index for the tourism sector. *Annals of Tourism Research*, 77, 49–61. doi:10.1016/j.annals.2019.05.007
- Smith, A., Stirling, A., & Berkhout, F. (2005). The governance of sustainable socio-technical transitions. *Research Policy*, 34(10), 1491–1510. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.07.005>
- Tops, J., & Lamers, M. (2024). Just tourism transitions? Sustainability policy interventions and implications on Boracay, Philippines. *Tourism Geographies*, 26(2), 237–254
- Torres-Delgado, A., & Palomeque, F. L. (2014). Measuring sustainable tourism at the municipal level. *Annals of Tourism Research*, 49, 122–137. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.09.003>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023). *First global stocktake (revised advance*

- version).  
[https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023.L17\\_adv.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023.L17_adv.pdf)
- UNWTO (2019). Baseline report on the integration of sustainable consumption and production patterns into tourism policies. UNWTO
- Van den Bergh, J. C. J. M., Truffer, B., & Kallis, G. (2011). Environmental innovation and societal transitions: Introduction and overview. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1), 1–23. Available at
- <https://doi.org/10.1016/j.eist.2011.04.010>
- Wearing, S. L., M. Wearing and M. McDonald (2010) 'Understanding Local Power and Interactional Processes in Sustainable Tourism: Exploring Village-Tour Operator Relations on the Kokoda Track, Papua New Guinea', *Journal of Sustainable Tourism* 18(1): 61–76
- Wodak, R., and Meyer, M. (2009). Critical discourse analysis: History, agenda, theory and methodology. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis* (2nd ed.). London: Sage. Pp.1-33